

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks sebuah negara, pertumbuhan ekonomi menempati posisi sentral yang krusial. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali dianggap sebagai parameter keberhasilan sebuah negara dalam menggerakkan proses pembangunan. Pembangunan ekonomi mencakup berbagai dimensi yang meliputi peningkatan pendapatan per kapita, mitigasi kemiskinan, restrukturisasi stratifikasi sosial, perubahan dalam nilai-nilai sosial, serta transformasi institusional.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya tertuang dalam Pancasila alinea kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam konsentrasi ini, sebuah negara diharapkan untuk memperbaiki standar hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas seluruh sektor kegiatan negara, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan komponen lainnya. Pembangunan ekonomi merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang efektif. Semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar juga peluang makin tinggi juga laju pertumbuhan PDRB harga konstan suatu daerah dalam berkegiatan ekonomi (Noviarita et al., 2021). Fenomena ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi positif terhadap taraf kesejahteraan masyarakat.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang secara khusus memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan penduduk, terdapat 16.771 pulau dan ±273 juta penduduk di Indonesia. Artinya, Indonesia membutuhkan pembangunan di setiap daerah yang merata agar terciptanya pemerataan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan terciptanya interaksi antar daerah. Pemerataan dilaksanakan dengan memperhatikan wilayah kecil dan besar, seperti desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, dan provinsi. Pembangunan yang memperhatikan wilayah kecil dan nasional dapat memberikan hasil yang

signifikan pada kemajuan suatu daerah dan negara. Karenanya, pencapaian pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ialah peningkatan kapasitas proses produksi untuk menyediakan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu yang panjang (Halim, 2020). Faktor-faktor produksi mencakup Sumber Daya Alam, tenaga kerja, dan pembentukan modal. Dengan pengelolaan faktor-faktor produksi secara tepat, masing-masing negara pasti meraih pertumbuhan ekonomi yang terbaik karena membawa manfaat bagi warga negaranya, baik terwujud dari wujud peningkatan penghasilan nasional atau menjabat petunjuk kesuksesan kinerja pemerintah (Noviarita et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) ialah besaran nilai tambah dari semua unit penjualan negara atau total nilai barang dan jasa pada seluruh bidang ekonomi di suatu negara yang dilihat berdasarkan harga konstan, berlaku pada wilayah/regional pada kurun waktu khusus, dan bisa terlihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 2021). Makin bertambahnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di sebagian wilayah menandakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi tolak ukur suatu negara dikatakan baik atau tidak (Priyono & Retno Handayani, 2021)

Provinsi Jawa Timur yaitu satu diantara wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat sempurna. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah otonomi Indonesia yang mempunyai perbatasan wilayah khusus dan total populasi terbanyak kedua di Indonesia, yaitu di tahun 2022 terdapat 41.150.000 jiwa (BPS, 2022). Meningkatnya total populasi di Provinsi Jawa Timur, maka peluang dalam memperluas pasar dan spesialisasi perekonomian juga akan besar. Ini menyiratkan bahwasanya Provinsi Jawa Timur mengalami pencapaian saat pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi. Dengan adanya pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan ini, keberadaan Provinsi Jawa Timur dapat mempengaruhi pencapaian dari hasil pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, dalam proses pembangunan yang merata,

terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, perlu adanya penyelesaian tentang bagaimana memacu sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Namun, pada tahun 2020 Indonesia mengalami tekanan ekonomi luar biasa yang diakibatkan penyakit pernafasan akut yang dinamai sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Tingginya perkembangan sebaran virus tersebut, pemerintah Indonesia terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengendalian virus tersebut dengan cara karantina, *lockdown*, pembatasan atau pembatalan acara, dan penutupan beberapa fasilitas publik.

**Tabel 1. 1 Realisasi Investasi, Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Investasi (Miliar Rupiah)	Pajak Daerah (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2018	33.333.129,8	15.060.713,3	5,47
2	2019	45.452.714,1	15.522.201,4	5,53
3	2020	55.660.575,2	14.412.667,2	-2,33
4	2021	52.552.238,5	15.400.864,4	3,56
5	2022	65.355.949,2	17.573.322,0	5,34

Sumber: Data diolah oleh [simreg.bappenas.go.id](http://simreg.bappenas.go.id), [nswi.bkpm.go.id](http://nswi.bkpm.go.id), dan [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, memaparkan bahwasanya investasi, penerimaan pajak daerah, serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2018-2022. Selain itu, terdapat perubahan yang lumayan penting di mana Tahun 2019 perolehan investasi dan pajak daerah menghadapi kenaikan yaitu kisaran sejumlah Rp45.452.714,1 miliar dan Rp15.522.201,4 miliar. Seharusnya peningkatan tersebut berkelanjutan pada tahun depan, tetapi di tahun 2020 Provinsi Jawa Timur dilanda pandemi yang salah satu kebijakan mengenai pembatasan segala

jenis aktivitas ekonomi terhentikan. Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran pandemi ini berdampak pada kekhawatiran masyarakat karena terjadinya penurunan bisnis di sektor jasa, transformasi fundamental ekonomi, struktur sektoral, susunan demografis dan geografisnya. Hal ini dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terjadi pengurangan sebanyak -2,33% yang berdampak juga pada pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp14.412.667,2 miliar. Akan tetapi, penerimaan investasi pada tahun 2020 justru meningkat sebesar Rp55.660.575,2 miliar walaupun pendapatan daerah dari sektor lain menurun.

Berikutnya di tahun 2021 penerimaan investasi dan pajak daerah terjadi fluktuatif. Peningkatan pajak daerah sebesar Rp15.400.864,4 miliar yang tidak diiringi oleh perkembangan investasi di Provinsi Jawa Timur. Penerimaan investasi tersebut justru menurun sebesar Rp52.552.238,5 miliar dengan kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3,56% menjadikan laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,89%. Pertumbuhan terjadi dari sisi produksi yaitu di Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebanyak 19,62%. Di waktu yang sama, pertumbuhan tertinggi dari sisi biaya berlaku di Bagian Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,61%. Berdasarkan fenomena di atas, menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan investasi dan pajak daerah menyebabkan cepatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur terjadi penyusutan. Tentunya tidak sejalan dalam teori yang menjelaskan apabila sumber penerimaan daerah naik, tentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah pasti juga naik.

Sejak berlakunya UU mengenai Otonomi Daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan kebijakan strategis dalam memajukan daerahnya masing-masing. Salah satu usaha pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkannya yaitu dengan mengupayakan investasi di dalam negeri ataupun investasi luar meningkat. Investasi bergantung pada kemajuan perekonomian sebuah daerah. Dari adanya investasi, sebuah daerah bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada daerahnya. Seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tersebut, pengangguran dan

kemiskinan akan mengurang dan akan terciptanya kemakmuran di wilayah tersebut (Ishak et al., 2020).

Dari sumber BPS Provinsi Jawa Timur, implementasi investasi yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2022 di Provinsi Jawa Timur terjadi peningkatan yang tidak stabil. Tercatat sebesar Rp252.354.607 miliar rupiah sepanjang tahun 2022. Nilai tersebut merupakan salah satu yang terbesar ke-tiga dari beberapa provinsi di Indonesia. Bentuk alokasi dari penerimaan investasi di Provinsi Jawa Timur terlihat dari beberapa kebijakan dari pemerintah yaitu memberi pelatihan kerja atau padat karya kepada masyarakat dengan mengembangkan keterampilan budaya serta Sumber Daya Alam di Jawa Timur, seperti membuat batik, logam, hasil kehutanan, olahan makanan, dan pertanian.

Pada tahun 2020, pemerintah Jawa Timur memberikan anggarannya kepada masyarakat yang terdampak masalah ekonomi melalui program-program semacam Program Keluarga Harapan Plus, Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji/Upah, Program Lumbung Pangan Jatim yang memastikan simpanan bahan pangan pokok di bawah harga pasar, Program Jatim Puspa dengan tujuan guna mengembangkan penguatan sosial ekonomi, Program Banpres Produktif Usaha Mikro, Program Pinjaman Dana Petani Jawa Timur (PKPJ) dan meningkatkan penyaluran pinjaman usaha masyarakat Jawa Timur dalam program Kredit Pemprov Jawa Timur Dana Bergulir. Program pemerintah tersebut dapat memulihkan dan memberikan akses keuangan untuk usaha produktif, memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Hasilnya hingga akhir tahun 2023, program tersebut dapat menyerap 36.194 tenaga kerja serta hasil data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018 sebesar 69,56% dan meningkat pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,23%. Dalam aspek produksi, sektor Transportasi dan Pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan sebesar 19,47%. Sementara itu, dari segi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri menunjukkan pertumbuhan tertinggi dengan angka 9,23%. Selain itu, dilihat berdasarkan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur per Agustus 2020 yaitu 5,84% dan menurun per Agustus 2022 menjadi 5,49%.

Walaupun salah satu penerimaan investasi tertinggi dibanding provinsi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berupaya untuk mengembangkan suasana investasi yang menarik agar investor berminat mendepositokan modalnya di Indonesia. Pemerintah harus mengimbangi dari segi fasilitas, pelayanan, teknologi, dan kemudahan perizinan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kondisi investasi yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Masyarakat di Jawa Timur didorong terus untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Tumbuhnya wirausaha baru di berbagai bidang ekonomi diharapkan secara bertahap mengurangi jumlah pengangguran.

Selain investasi, penerimaan pajak daerah ialah satu diantara faktor menunjang pertumbuhan ekonomi di seluruh Provinsi Jawa Timur. Pajak daerah ialah sumber penerimaan daerah yang dikelola pemerintah daerah. Pajak daerah dikelola [ada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memaparkan bahwasanya pajak daerah adalah peran serta masyarakat baik individu ataupun lembaga pada daerah yang bersifat pemaksaan serta imbalannya secara tidak langsung ditujukan sebagai mekanisme agar mengimplementasikan kebijakan pemerintah guna membiayai keperluan serta kemakmuran daerah.

Provinsi Jawa Timur satu diantara provinsi tertinggi saat menyumbang penerimaan pajak daerah di Indonesia. Mayoritas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur datang dari pajak. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan data pelaksanaan penerimaan pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang meliputi realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp7.621.089.134.945, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3.975.651.734.300, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 2.760.340.355.239, Pajak Air Permukaan Rp45.049.073.257, Pajak Rokok Rp 3.171.189.775.570.

Berdasarkan data alokasi Provinsi Jawa Timur, pajak daerah dialokasikan sebagai penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Banyaknya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, taman, dan fasilitas lainnya membuat Jawa Timur mendapatkan prestasi dan penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan standar pelayanan minimal pada tahun 2022. Sesuai pada Program Nawa Bhakti Satya yang dirancang Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu Hj. Khofifah Indra Parawansa, mengatakan bahwa pajak daerah dialokasikan untuk mensejahterakan masyarakat melalui program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas), program Millennial Job Center (MJC), dan program penyediaan fasilitas kesehatan. Hal ini tentunya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi penduduk Jawa Timur yakni di Tahun 2022 ekonomi Jawa Timur meningkat sebesar 5,34%. Pada aspek produksi, sektor dengan pertumbuhan tertinggi ialah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, yang meningkat sebesar 19,47%. Sementara itu, di sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar ada pada Komponen Ekspor Luar Negeri, dengan kenaikan sebesar 9,23%.

Namun, kebijakan terkait kenaikan tarif pajak yang berlangsung di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun akan menurunkan daya tarik masyarakat untuk melakukan transaksi, konsumsi, dan investasi. Salah satu contohnya yaitu kenaikan pajak hiburan yang semula 25% menjadi 40-75% yang mengakibatkan menurunnya minat beli masyarakat terhadap suatu hiburan dan omset suatu perusahaan menurun. Dari sisi pendapatan, pemerintah pun juga tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah merupakan faktor yang mempengaruhi minat beli masyarakat, karena pajak daerah merupakan sumber kontribusi daerah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan sebagai dasar perancangan dalam meningkatkan APBD. Di samping itu, perlu adanya strategi dalam membuat kebijakan pajak daerah yang dapat memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, sarana, prasarana, perkembangan sektor unggul dalam pajak daerah, dan potensi pajak yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan rencana di tahun yang akan datang.

Seiring dengan pembahasan di atas, penulis berkeinginan agar menjalankan penelitian lebih lanjut guna memahami variabel investasi dan pajak daerah memengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, penulis melaksanakan penelitian ini berjudul “Pengaruh Investasi dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terjadi dampak investasi terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
2. Apakah terjadi dampak penerimaan pajak daerah terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Pengaruh investasi terkait pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2018-2022.
2. Pengaruh penerimaan pajak daerah terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang serta pertanyaan penelitian yang diuraikan tersebut, hasil yang akan tercapai dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam perspektif teori, hasil studi ini bisa memperkaya pemahaman dan menyediakan sumber referensi baru untuk penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, temuan dari penelitian ini berharap bisa dijadikan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait dalam membuat keputusan terkait masalah yang relevan dengan penelitian ini, dan berfungsi sebagai referensi bagi para akademisi guna meneruskan penelitian di masa depan.